

## ABSTRAK

**Masnah, S.E.I** : Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah. Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, dibawah bimbingan I: Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I, dan bimbingan II: Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2020).

**Kata Kunci:** *Penyaluran Program Keluarga Harapan, Maqashid Al-Syariah*

Rumusan Penelitian ini adalah bagaimana aspek yuridis mekanisme penyaluran Bansos No Tunai PKH ? Bagaimana Tinjauan Maqashid Al-Syariah dengan tujuan penelitian menjelaskan serta melakukan analisis regulasi mekanisme penyaluran Bansos Non Tunai Program Keluarga Harapan dan menjelaskan tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap mekanisme penyaluran Bansos Program Keluarga Harapan. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dalam pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*), Melalui teknik analisis deskriptif, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

*Pertama:* Aspek yuridis dari mekanisme pendistribusian bansos non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) yakni diatur dalam Perpres No. 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial non-tunai, dan Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Dari hasil kajian yang dilakukan didapati fakta bahwa di daerah pedesaan dan wilayah yang jauh dari akses perbankan, terutama bagi para lansia dan warga yang tidak terlalu memahami penggunaan ATM cenderung dilakukan pencairan secara kolektif dengan dikumpulkan pada pihak tertentu yang lebih paham tentang penggunaan ATM. Hal ini kemudian memunculkan berbagai resiko karena ATM tidak dipegang sendiri oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sendiri. Penulis mendapati adanya kekosongan hukum terkait norma yang mengatur penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) oleh pihak lain untuk tujuan membantu dan sebagainya, kekosongan hukum tersebut dapat memastikan bahwa KPM mendapat pendampingan terkait proses pencairan hal ini untuk memastikan besaran bantuan yang diterima sesuai dan sampai ke tangan Keluarga Penerima Manfaat sesuai jumlah.

*Kedua:* Tinjauan *Maqashid Al-Syariah* terhadap dua norma di atas ialah kekosongan hukum yang mengakibatkan rentannya penyalahgunaan Kartu Keluarga Sejahtera oleh pihak lain baik resiko penipuan atau pengurangan bansos. Dari sisi kemaslahatan, maka kebijakan-kebijakan penyaluran bansos PKH yang berpotensi membahayakan harta warga miskin penerima bansos dari sudut pandang *maqashid al-syariah* termasuk ke dalam kategori mafsadat. Kebijakan norma di atas tidak sesuai dengan tuntunan hukum Islam karena mengancam keutuhan dana bansos yang merupakan harta KPM, sehingga kebijakan itu menciderai tercapainya maslahat *al-dharûriyah* (terlindunginya keselamatan jiwa dan hartawargapenerima bansos).